



I N T E G R A
G R O U P

**Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Yang Tidak Diaudit
Tanggal 31 Maret 2018**

**PT Integra Indocabinet Tbk
Dan Entitas Anaknya**

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit

Tanggal 31 Maret 2018

dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit

Tanggal 31 Maret 2018

dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut

(Mata Uang Rupiah Indonesia)

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak di audit	1
Laporan Laba Rugi Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	4
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian <i>Interim</i> tidak diaudit	5 - 46

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2018 DAN 2017
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : Halim Rusli |
| Alamat Kantor | : Desa Betro RT 013, RW 007
Betro, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Margorejo Indah B-825
Kec. Wonocolo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8911209 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Wang Sutrisno |
| Alamat Kantor | : Desa Betro RT 013, RW 007
Betro, Sedati
Sidoarjo |
| Alamat Domisili | : Jl. Kertajaya Indah Timur 17/56
Kec. Sukolilo-Surabaya |
| Nomor Telepon | : (62-31) 8911209 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Integra Indocabinet Tbk dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 27 April 2018
Atas nama dan mewakili Direksi



Halim Rusli
Direktur Utama

Wang Sutrisno
Direktur

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 31 Maret 2018
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	31 Maret 2018	31 Desember 2017
	Tidak diaudit	Diaudit
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	42.155.773.756	54.484.119.698
Piutang usaha		
Pihak ketiga, bersih	177.119.683.299	165.131.299.130
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	37.069.555.594	26.986.081.319
Persediaan	1.226.971.381.733	1.172.714.985.955
Pajak dibayar di muka	62.789.286.684	54.342.656.240
Biaya dibayar di muka	10.177.848.310	10.251.828.347
Uang muka pembelian	253.830.888.820	179.085.431.232
Taksiran tagihan pajak	3.035.296.521	3.400.226.209
Jumlah Aset Lancar	1.813.149.714.717	1.666.396.628.130
ASET TIDAK LANCAR		
Uang muka pembelian	288.720.130.951	466.009.958.513
Aset pajak tangguhan	5.556.171.199	7.173.866.463
Properti investasi	15.880.000.000	15.880.000.000
Investasi	16.560.000.000	-
Aset tetap - bersih	1.660.399.908.052	1.679.940.601.050
Aset lain-lain - bersih	7.093.848.549	7.601.079.185
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.994.210.058.751	2.176.605.505.211
JUMLAH ASET	3.807.359.773.468	3.843.002.133.341

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian *Interim* tidak diaudit terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasia *Interim* tidak diaudit ini secara keseluruhan.

PT INTEGRAL INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 31 Maret 2018
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	31 Maret 2018 Tidak diaudit	31 Desember 2017 Diaudit
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	1.092.145.438.700	1.125.325.822.790
Utang usaha		
Pihak ketiga	93.512.650.610	122.615.859.245
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	14.413.625.493	7.990.600.687
Pihak berelasi	-	470.400.000
Beban akrual	10.179.660.546	12.715.273.252
Utang pajak	53.199.580.477	54.559.765.600
Uang muka pelanggan	40.815.060.700	56.451.105.981
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	27.396.176.310	91.051.056.058
Utang sewa pembiayaan	10.036.945.378	13.410.290.529
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.341.699.138.214	1.484.590.174.142
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :		
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	128.653.221.668	84.465.688.684
Utang sewa pembiayaan	5.690.723.271	6.258.684.624
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	123.487.450.314	106.851.017.926
Pihak ketiga		
Liabilitas pajak tangguhan	207.093.004.356	207.093.004.356
Liabilitas imbalan kerja	40.365.326.450	41.119.457.929
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	505.289.726.059	445.787.853.519
JUMLAH LIABILITAS	1.846.988.864.273	1.930.378.027.661

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit
Tanggal 31 Maret 2018
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

	31 Maret 2018 Tidak diaudit	31 Desember 2017 Diaudit
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada periode 31 Maret 2018 dan Tahun 2017	625.000.000.000	625.000.000.000
Tambahan modal disetor	213.063.468.642	213.063.468.642
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	144.681.587.504	141.425.224.187
Selisih transaksi nilai ekuitas dengan pihak non-pengendali	2.835.985.951	2.835.985.951
Penghasilan Komprehensif lain	622.628.956.311	622.628.956.311
Saldo laba	343.026.685.651	285.210.746.441
Sub-jumlah	<u>1.951.236.684.059</u>	<u>1.890.164.381.532</u>
Kepentingan non-pengendali	9.134.225.136	22.459.724.148
JUMLAH EKUITAS	<u>1.960.370.909.195</u>	<u>1.912.624.105.680</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>3.807.359.773.468</u>	<u>3.843.002.133.341</u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
31 Maret 2018
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Maret 2018	31 Maret 2017
PENJUALAN BERSIH	468.531.542.717	466.253.882.898
BEBAN POKOK PENJUALAN	(324.297.492.500)	(321.393.641.404)
LABA BRUTO	144.234.050.217	144.860.241.494
Beban Penjualan	(20.128.043.919)	(16.320.130.757)
Beban umum dan administrasi	(27.893.013.893)	(26.072.888.836)
Jumlah Beban Operasional	(48.021.057.812)	(42.393.019.593)
Pendapatan Operasional	96.212.992.405	102.467.221.901
Pendapatan (Beban) Lain - Lain		
Beban bunga	(30.430.823.148)	(29.895.560.247)
Beban administrasi bank	(1.071.694.015)	(911.892.057)
Penghasilan bunga	1.687.451.791	247.849.677
Lain - lain bersih	3.344.178.828	1.209.160.200
Laba (rugi) pelepasan aset tetap	(149.072.962)	(65.303.977)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	3.997.133.531	(457.718.678)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain - Lain	(22.622.825.975)	(29.873.465.082)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	73.590.166.430	72.593.756.819
MANFAAT (BEBAN) PAJAK		
Kini	(16.431.544.000)	(18.199.122.297)
Tanggungan	-	-
Jumlah beban pajak - bersih	(16.431.544.000)	(18.199.122.297)
LABA TAHUN BERJALAN	57.158.622.430	54.394.634.522

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2018
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal saham	Tambahan Modal Disetor	STPEA	Cadangan Pengukuran Imbalan Kerja	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Selisih Translasi	RE	Total	NCI	Total Eq.
Saldo Awal - 1 Januari 2018	625.000.000.000	213.063.468.642	2.835.985.951	1.406.832.078	621.222.124.233	141.425.224.187	285.210.746.441	1.890.164.381.532	22.459.724.148	1.912.624.105.680
Laba tahun berjalan							56.956.408.697	56.956.408.697	202.213.733	57.158.622.430
Dividen								-		-
Komponen Ekuitas Lainnya						3.256.363.317	859.530.513	4.115.893.830	(13.527.712.745)	(9.411.818.915)
Saldo 31 Maret 2018	625.000.000.000	213.063.468.642	2.835.985.951	1.406.832.078	621.222.124.233	144.681.587.504	343.026.685.651	1.951.236.684.059	9.134.225.136	1.960.370.909.195

	Modal saham	Tambahan Modal Disetor	STPEA	Cadangan Pengukuran Imbalan Kerja	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Selisih Translasi	RE	Total	NCI	Total Eq.
Saldo Awal - 1 Januari 2017	500.000.000.000	25.093.405.789	1.763.749.431	-	640.440.950.720	141.425.224.187	95.685.208.599	1.404.408.538.726	25.624.443.100	1.430.032.981.826
Laba tahun berjalan							53.762.061.284	53.762.061.284	632.573.238	54.394.634.522
Dividen								-		-
Komponen Ekuitas Lainnya								-		-
Saldo 31 Maret 2017	500.000.000.000	25.093.405.789	1.763.749.431	-	640.440.950.720	141.425.224.187	149.447.269.883	1.458.170.600.010	26.257.016.338	1.484.427.616.348

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2018
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan lain)

	31 Maret 2018	31 Maret 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	440.907.113.267	482.922.419.939
Pembayaran kas kepada pemasok, direksi, karyawan dan beban operasional lain-lain	(331.517.194.630)	(410.375.214.964)
<hr/>		
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	109.389.918.637	72.547.204.975
Penghasilan keuangan	1.687.451.791	247.849.677
Beban keuangan	(31.502.517.163)	(30.807.452.304)
Pembayaran pajak	(12.166.198.082)	(18.199.122.297)
Penerimaan pajak	364.929.688	(30.578.951.578)
Lain-lain - bersih	3.344.178.829	1.209.160.200
<hr/>		
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	71.117.763.700	(5.581.311.327)
<hr/>		
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS		
INVESTASI		
Perolehan aset lain-lain	(4.985.628.716)	(11.514.870.436)
Hasil pelepasan aset tetap	(223.308.500)	(65.303.977)
Perolehan aset tetap	(21.604.387.432)	-
<hr/>		
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(26.813.324.648)	(11.580.174.413)
<hr/>		

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2018 (Lanjutan)
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan lain)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS

PENDANAAN

Penambahan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	(82.713.818.454)	28.455.500.409
Pembayaran utang sewa	-	-
Penambahan utang sewa	(2.972.497.104)	(2.220.704.110)
Tambahan modal disetor	-	-
Pembayaran hutang pemegang saham	-	-
	<hr/>	<hr/>
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(85.686.315.558)	26.234.796.299
	<hr/>	<hr/>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN	(41.381.876.506)	9.073.310.559
	<hr/>	<hr/>
KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AWAL TAHUN	(9.808.479.128)	(68.526.045.999)
	<hr/>	<hr/>
KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AKHIR TAHUN	(51.190.355.634)	(59.452.735.440)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kas, setara kas dan cerukan terdiri dari:		
Kas dan setara kas	42.155.773.756	36.152.566.463
Cerukan	(93.346.129.390)	(95.605.301.903)
JUMLAH	(51.190.355.634)	(59.452.735.440)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian ini secara keseluruhan.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Integra Indocabinet Tbk (“Perusahaan” atau “ITG”) didirikan berdasarkan akta notaris Soetjipto, S.H., No. 147 tanggal 19 Mei 1989. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-320.HT.01.01.th’90 tanggal

20 Januari 1990. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 17 tanggal 7 Maret 2017 antara lain mengenai perubahan status Perusahaan menjadi perseroan terbuka. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005787.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan dan jasa.

Perusahaan berkedudukan di Sidoarjo dan saat ini bergerak dalam bidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya. Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasinya pada tahun 1989.

PT Integra Indo Lestari (IIL) adalah entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-307/D.04/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana telah dinyatakan efektif. Pada tanggal 21 Juni 2017, Perusahaan mencatatkan 1.250.000.000 lembar sahamnya dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 per saham di Bursa Efek Indonesia

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal **31 Maret 2018** adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hendro Rusli
Komisaris	:	Stephanie Kane Ilham
Komisaris Independen	:	Bing Hartono Poernomosidi
	:	Heri Sunaryadi

Direksi

Direktur Utama	:	Halim Rusli
Direktur	:	Widjaja Karli
	:	Syany Tjandra
Direktur Independen	:	Wang Sutrisno
Wakil Direktur Utama	:	Meity Linlin

Perusahaan dan Entitas Anaknya (bersama-sama disebut “Kelompok Usaha”) memiliki 2.499 orang karyawan tetap pada tanggal **31 Maret 2018** (tidak diaudit).

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Maret 2018, Perusahaan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Aktivitas Bisnis	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)	
				31 Maret 2018			
				31 Mar, 2018	31 Des, 2017	31 Mar, 2018	31 Des, 2017
Kepemilikan Langsung/ <i>Direct Ownership</i>							
PT Narkata Rimba (NKT)	Kalimantan Timur/ <i>East Kalimantan</i>	a	1978	99.00%	99.00%	114,135	112,374
PT Belayan River Timber (BRT)	Kalimantan Timur / <i>East Kalimantan</i>	a	1978	99.00%	99.00%	385,114	371,760
PT Intertrend Utama (ITR)	Sidoarjo	b	1993	99.68%	99.68%	880,090	851,443
PT Interkraft (ITK)	Sidoarjo	b	2002	99.45%	99.45%	688,193	685,958
PT Intera Indonesia (INT)	Sidoarjo	b	2012	99.00%	99.00%	256,794	223,177
PT Integriya Dekorindo (ITD)	Sidoarjo	c	2013	99.80%	99.80%	172,603	176,937
PT Inter Kayu Mandiri (IKM)	Sidoarjo	d	2015	80.00%	80.00%	16,599	203,564

Aktivitas Bisnis Entitas Anak / *Subsidiaries's Business Activity*
a. Industri Hak Pengelolaan Hutan/ *Forest Concession Right Industry*
b. Industri Mebel/ *Furniture Industry*
c. Perdagangan dan Jasa/ *Services and Trading*
d. Perusahaan Induk/ *Holding Company*

PT Narkata Rimba

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham NKT menyetujui untuk pembagian dividen saham sebesar Rp 14,5 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 5 tanggal 21 Juli 2016, para pemegang saham NKT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dari Rp 30 miliar menjadi Rp 44,5 miliar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-001378.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 17 tanggal 5 September 2016, para pemegang saham NKT menyetujui pengalihan saham NKT sebesar 8.979 lembar saham dari PT Alam Mentari Sejahtera ke Perusahaan.

PT Belayan River Timber

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham BRT menyetujui untuk pembagian dividen saham sebesar Rp 11,5 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 4 tanggal 21 Juli 2016, para pemegang saham BRT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dari Rp 56,407 miliar menjadi Rp 67,907 miliar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013769.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 16 tanggal 5 September 2016, para pemegang saham BRT menyetujui pengalihan saham BRT sebesar 129.024 lembar saham dari IIL ke Perusahaan.

PT Intertrend Utama

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 2 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham ITR menyetujui untuk pembagian dividen saham sebesar Rp 36 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 2 September 2016, para pemegang saham ITR menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 91 miliar menjadi Rp 155,006 miliar.

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Entitas Anak

PT Intertrend Utama

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 21 Juni 2017, para pemegang saham ITR menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 155,006 miliar menjadi Rp 280,006 miliar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014246.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017

PT Interkraft

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 4 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham ITK menyetujui untuk pembagian dividen saham sebesar Rp 53 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 21 Juni 2017, para pemegang saham ITK menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 118 miliar menjadi Rp 213 miliar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0014241.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017.

PT Intera Indonesia

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 2 September 2016, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 11,3 miliar menjadi Rp 22,6 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 11 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham INT menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dari Rp 10,2 miliar menjadi Rp 11,3 miliar.

Berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 30 Juni 2016, para pemegang saham INT menyetujui untuk membagikan dividen saham sebesar Rp 1,1 miliar.

PT Integriya Dekorindo

Berdasarkan akta notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 21 Juni 2017, para pemegang saham ITD menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula berjumlah Rp 20,2 miliar menjadi Rp 100,2 miliar.

PT Inter Kayu Mandiri

IKM didirikan berdasarkan akta notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., No. 5 tanggal 19 Agustus 2015 dengan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 16,56 miliar.

d. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 25 April 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan "PSAK" No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan". Kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Kelompok Usaha.

b. Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru Beserta

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Berlaku Efektif 1 Januari 2017:

- Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK No. 1, antara lain, mengklarifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis penyajian catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja, berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara dimana obligasi tersebut berada.
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diperkenankan. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.
- ISAK No. 31: Interpretasi atas ruang lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi. ISAK ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13.

Kelompok Usaha telah mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut di atas dan menentukan dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Berlaku Efektif 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.
- Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (LANJUTAN)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Pengendalian didapat ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara khusus, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* mempengaruhi jumlah imbal investor.

Ketika Kelompok Usaha memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Kelompok Usaha dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara yang lain;
- hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara dan hak potensial Kelompok Usaha .

Kelompok Usaha menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas Entitas Anaknya dimulai ketika Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas Anaknya dan berhenti ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas Entitas Anaknya. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban atas Entitas Anaknya yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Kelompok Usaha menghentikan pengendalian atas Entitas Anaknya.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Kelompok Usaha dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hasil di KNP mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Kelompok Usaha akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Seluruh akun dan transaksi antar perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan Entitas Anaknya disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan.

Perubahan kepemilikan di Entitas Anaknya, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas Entitas Anaknya, maka:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anaknya;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi;
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Kelompok Usaha akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Rugi Entitas Anaknya yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anaknya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laba atau rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada Entitas Anaknya yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat atas neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambah modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi selisih kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Maret 2018, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut

Mata Uang	Maret 2018	2017
US\$ 1	13,756	13,548
Euro 1	16,954	16,174
Sin\$ 1	10,487	10,134
RMB 1	2,182	2,073

f. Instrumen Keuangan

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

i. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Pengklasifikasian ini tergantung pada hakekat dan tujuan aset keuangan diperoleh dan ditetapkan pada saat pengakuan awal. Tidak terdapat klasifikasi aset keuangan Kelompok Usaha sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) dan aset keuangan tersedia untuk dijual.

Aset keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan awal (Lanjutan)

Aset keuangan Kelompok Usaha yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang mencakup kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, dan (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Kelompok Usaha mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan atas aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan sebagian (sebagai contoh ketika Kelompok Usaha memegang opsi untuk membeli kembali bagian dari aset yang ditransfer) Kelompok Usaha mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari aset keuangan antara bagian berkelanjutan yang diakui dalam keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui dengan menggunakan nilai wajar relatif dari bagian tersebut pada tanggal pengalihan. Selisih antara nilai tercatat yang dialokasikan dengan bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari penerimaan dari bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan dan telah diakui pada penghasilan komprehensif lain diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan antara bagian yang berkelanjutan diakui dan bagian yang tidak lagi diakui dengan dasar nilai wajar relatif pada bagian-bagian tersebut.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset Keuangan (Lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kelompok Usaha menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, termasuk aset dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan kelompok secara

kolektif dinilai untuk penurunan nilai. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif pada awal aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan kelompok tersebut.

Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut juga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

ii. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi mencakup utang bank dan lembaga keuangan bukan bank, utang usaha, utang lain-lain, dan beban akrual.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, pada liabilitas keuangan yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga akrual dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas keuangan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau terdapat modifikasi secara substansial atau persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

iii. Metode suku bunga efektif (SBE)

Metode SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan mengalokasikan penghasilan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang (termasuk semua biaya yang diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari aset keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

iv. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau pengurangan. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

v. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

vi. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Kelompok Usaha menilai instrumen keuangan seperti derivatif, pada nilai wajar setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai wajar atas instrumen keuangan diukur pada biaya diamortisasi diungkapkan di Catatan 27.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Kelompok Usaha harus memiliki akses ke pasar utama.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan, dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis;
- Level 2 - Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

vi. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Kelompok Usaha telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank termasuk semua investasi yang tidak dibatasi penggunaannya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyajian laporan arus kas konsolidasian, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Nilai perolehan ditentukan dengan metode rata-rata yang meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang timbul hingga persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Persediaan barang jadi dan barang dalam proses mencakup alokasi yang layak atas biaya produksi tidak langsung tetap dan variabel, disamping bahan baku dan upah langsung.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan persediaan usang ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi. Jika aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, maka revaluasi secara tahunan, apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan maka aset tersebut perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Surplus/defisit revaluasi aset tetap yang dipindahkan secara berkala setiap periode ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antar jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus/defisit revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap jumlah biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Pada saat pembaharuan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi berjalan.

Penyusutan aset tetap, kecuali tanah, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Bangunan	10-20
Sarana prasarana	10
Instalasi listrik	8-20
Mesin dan peralatan	4-16
Alat-alat berat	8
Kendaraan	4-8
Inventaris kantor	4-8
Inventaris kamp	4-8
Inventaris pabrik	4-8
Inventaris toko	4-8

Tanah tidak diamortisasi.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dikeluarkan ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba atau rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap telah ditelaah oleh manajemen dan jika perlu disesuaikan secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap atau properti investasi yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset tetap – bangun, kelola dan alih berupa bangunan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis dari aset tetap – bangun, kelola dan alih yang bersangkutan, maksimum sesuai jangka waktu perjanjian.

k. Properti Investasi

Properti investasi Entitas Anak terdiri dari tanah yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi disajikan sebesar nilai revaluasi. Revaluasi akan dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Kelompok Usaha menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Kelompok Usaha menjadi properti investasi, Kelompok Usaha mencatat properti investasi tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

l. Biaya Pengelolaan Hak Pengusahaan Hutan

Biaya/iuran yang terjadi untuk memperoleh "Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)"; seperti biaya Hak Pengusahaan Hutan (HPH), analisis mengenai dampak lingkungan, foto udara dan rencana karya pengusahaan hutan, ditanggung dan diamortisasi selama sisa masa manfaat masing-masing IUPHHK tersebut dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu IUPHHK.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset non-keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut untuk menentukan kerugian penurunan nilai (jika ada). Jika tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan secara individual, Kelompok Usaha akan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset ("UPK").

Estimasi jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Ketika jumlah terpulihkan suatu aset non-keuangan (UPK) di bawah nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan kerugian penurunan nilai yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pendapatan diakui ketika risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan dengan waktu pengiriman dan penerimaannya.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

o. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa, atau perjanjian yang mengandung sewa, didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset spesifik dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada *lessee*, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Kelompok Usaha sebagai *lessee*

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset sewa pembiayaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan secara konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewa pembiayaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Kelompok Usaha sebagai *lessor*

Kelompok Usaha mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Rental kontinjen, jika ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus sesuai dengan perjanjian sewanya.

p. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha mempunyai transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi-transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas anak sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

r. Perpajakan

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini yang berasal dari tahun berjalan dan tahun lalu dicatat sebesar jumlah ekspektasi direstitusi dari atau dibayarkan kepada kantor pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil Kelompok Usaha sehubungan dengan situasi dimana interpretasi diperlukan untuk peraturan perpajakan yang terkait dan menetapkan provisi jika diperlukan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut telah ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi.

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan di-*review* pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Pajak tangguhan yang terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Pos pajak tangguhan diakui terkait dengan transaksi yang mendasarinya baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

s. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UUK"). Berdasarkan UUK, Kelompok Usaha diharuskan untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada karyawan jika persyaratan yang ditentukan dalam UU tersebut terpenuhi.

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto.

Pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal diantara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Kelompok Usaha mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (kurtailmen) tidak rutin, dan;
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

t. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

Seluruh provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi dibatalkan.

u. Laba per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal **31 Maret 2018**, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

v. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Segmen Operasi (Lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

w. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Sesuai dengan PSAK No. 70, aset pengampunan pajak diukur pada saat pengakuan awal sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* dan menjadi dasar bagi Kelompok Usaha dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal mengacu pada standar akuntansi keuangan yang relevan.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Kelompok Usaha mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam akun Tambahan Modal Disetor. Kelompok Usaha mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode SKPP disampaikan.

x. Peristiwa setelah Periode Laporan Keuangan Konsolidasian

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Kelompok Usaha pada periode laporan keuangan konsolidasian ("*adjusting events*") disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

a. Pertimbangan

i. Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari Kelompok Usaha.

ii. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014). Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

iii. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

a. Pertimbangan (Lanjutan)

iv. Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

v. Revaluasi Tanah dan Bangunan

Kelompok Usaha mengukur tanah dan bangunan pada jumlah revaluasian dengan perubahan pada nilai wajar diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain (OCI). Kelompok Usaha melibatkan penilai independen dalam menentukan nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2016. Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan berdasarkan bukti pasar dengan menggunakan harga yang dapat dibandingkan dan disesuaikan terhadap faktor-faktor pasar spesifik seperti sifat, lokasi dan kondisi aset tersebut.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

ii. Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat atau disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

iii. Pertimbangan Nilai Wajar dari Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

iv. Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

v. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

vi. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan ke depan dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

vii. Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Kelompok Usaha membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Mulai 1 Januari 2016, mata uang fungsional Kelompok Usaha menurut biaya dan pendanaan menggunakan mata uang Rupiah. Dengan demikian, laporan keuangan pencatatan Kelompok Usaha berubah dari USD ke IDR.

Sesuai dengan ketentuan PSAK 10, ketika ada perubahan dalam mata uang fungsional entitas, entitas harus menerapkan prosedur translasi berlaku untuk mata uang fungsional baru secara prospektif sejak tanggal perubahan yang efektif 1 Januari 2016.

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
KAS	2.718.202.929	2.528.944.923
BANK		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	5.309.007.911	11.673.794.757
PT Bank Central Asia Tbk	12.991.533.814	15.047.995.268
PT UOB Buana Indonesia	46.749	254.749
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	46.354.581	46.590.581
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	120.417.897	365.489.042
PT Bank ICBC	28.069.783	35.610.946
PT. Bank Mega Tbk	1.213.741	2.791.853
Bank Mizuho Indonesia		1.038.974
Bank of Tokyo		835.500
<u>Dollar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	8.846.788.736	11.897.812.414
PT Bank Central Asia Tbk	93.991.611	311.655.484
PT UOB Buana Indonesia	5.719.195	5.766.978
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	34.608.445	19.198.464
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.249.887	28.981.204
PT Bank ICBC	1.778.249.813	266.976.888
China Trust Bank		
Bank Mizuho Indonesia		2.676.814
<u>Ren Min Bi</u>		
PT Bank ICBC	5.549.664	44.193.400
<u>Dollar Australia</u>		
Bank Mizuho Indonesia		3.511.459
SETARA KAS - DEPOSITO BERJANGKA		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.149.769.000	1.200.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	8.000.000.000	11.000.000.000
PT Bank ICBC		-
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS	42.155.773.756	54.484.119.698

Deposito berjangka memperoleh tingkat bunga sebesar 3,4% - 7% dan 4% - 6,5% masing-masing pada periode 31 Maret 2018 dan 2017.

Tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan dan dibatasi penggunaannya.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. PIUTANG USAHA – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Ekspor</u>		
Origin by Alpine	7.496.563.739	10.626.161.121
IKEA Distribution Services	9.114.882.410	9.676.981.425
Alpine Furniture Inc	7.151.782.830	8.353.723.896
The Home Depot		7.848.733.533
Costco Wholesale Corporation	33.581.149.290	7.502.930.725
Target	17.407.977.545	7.170.259.626
PKF Howdens Joinery Co		6.708.484.853
China National Forest Products Industry Corporation	21.144.271.426	5.635.532.161
China Forestry Group Jiangxi Fenghe Industry Co. Ltd		4.131.264.393
American Woodcrafter		3.963.841.460
Jak Post	4.045.732.178	
Room To Go	5.082.908.792	3.821.440.329
Wood United Source Pte Ltd		3.537.250.070
Dekker Hout Den Haag B.V	3.067.102.826	3.468.056.367
DMI Furniture Inc.	5.152.275.410	1.623.016.530
Composite Technology International	3.100.550.237	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 3 miliar)	28.195.480.726	21.689.405.816
Sub Jumlah	144.540.677.409	105.757.082.305
<u>Lokal</u>		
Dinas Pendidikan Kota Surabaya		11.200.393.721
PT Kayu Lapis Asli Murni		8.007.826.813
PT. Wijaya Tri Utama Plywood Ind.	5.335.283.141	
Koperasi Mitra Usaha Kayu Sejahtera	5.000.000.000	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik	5.664.213.846	5.664.213.846
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 3 miliar)	16.579.508.903	34.573.877.817
Sub Jumlah	32.579.005.890	59.446.312.197
Jumlah	177.119.683.299	165.203.394.502
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(72.095.372)
Jumlah - Bersih	177.119.683.299	165.131.299.130

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Tanggal 31 Maret 2018
 Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
Rupiah	41.693.888.300	69.051.198.250
Dollar Amerika Serikat (US\$9.844.853 dan US\$ 7.091.829 masing- masing pada periode 31 Maret 2018 dan Tahun 2017)	135.425.794.999	96.080.100.880
Sub Jumlah	177.119.683.299	165.131.299.130

c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
1 - 30 hari	154.767.275.822	120.342.052.165
31 - 60 hari	11.667.740.503	21.816.399.221
61 – 90 hari	4.542.719.889	10.954.379.567
> 90 hari	6.141.947.085	12.018.468.177
Sub Jumlah	177.119.683.299	165.131.299.130

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri dari:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Barito Nusantara Indah	26.105.811.053	22.744.078.643
Lain-lain	10.963.744.541	4.242.002.676
Sub Jumlah	37.069.555.594	26.986.081.319
Jumlah	37.069.555.594	26.986.081.319

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa tidak ada penurunan piutang.

8. PERSEDIAAN

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
<u>Manufaktur</u>		
Bahan baku dan pembantu	793.866.215.419	740.931.266.485
Barang dalam proses	143.351.840.165	130.388.858.541
Barang jadi	79.879.617.803	104.270.058.760
Barang dalam perjalanan	-	394.006.011
<u>Kehutanan</u>		
Bahan baku dan pembantu	189.129.003.997	174.156.998.098
<u>Perdagangan</u>		
Barang dagangan	20.744.704.349	22.573.798.060
Jumlah	1.226.971.381.733	1.172.714.985.955

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang, oleh karena itu tidak dibentuk penyisihan atas persediaan usang.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Tanggal 31 Maret 2018
 Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

9. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
Pajak Pertambahan Nilai	62.789.286.684	54.342.656.240
Jumlah	62.789.286.684	54.342.656.240

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, jumlah pajak yang telah dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Pajak dibayar di muka" karena Kelompok Usaha masih belum memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan pada akhir periode pelaporan.

10. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini terdiri dari uang muka pembelian atas:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
Aset tetap	341.713.267.643	466.009.958.513
Persediaan	135.579.772.190	178.596.864.842
Lain-lain	65.257.979.938	488.566.390
Jumlah	542.551.019.771	645.095.389.745
Disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:		
Aset lancar	253.830.888.820	179.085.431.232
Aset tidak lancar	288.720.130.951	466.009.958.513
Jumlah	542.551.019.771	645.095.389.745

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. ASET TETAP – BERSIH DAN PROPERTI INVESTASI

31 Maret 2018

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai tercatat				
Pemilikan langsung				
Tanah	814.560.000.000	-	-	814.560.000.000
Bangunan	467.592.197.211	54.000.000	343.942.499	467.302.254.712
Sarana prasarana	70.561.234.844	-	-	70.561.234.844
Instalasi listrik	33.703.872.701	-	91.368.253	33.612.504.448
Mesin dan peralatan	248.909.964.000	3.996.254.137	20.457.856.045	232.448.362.092
Alat-alat berat	165.134.032.402	1.691.802.082	748.829.419	166.077.005.065
Kendaraan	82.244.930.536	1.054.363.636	1.298.247.116	82.001.047.056
Inventaris Kantor	15.554.493.218	240.197.411	461.744.426	15.332.946.203
Inventaris Camp	1.280.150.168	12.549.000	-	1.292.699.168
Inventaris Pabrik	5.084.712.902	61.860.716	335.526.079	4.811.047.539
Inventaris Toko	1.603.414.989	13.944.500	-	1.617.359.489
Sub-jumlah	1.906.229.002.971	7.124.971.482	23.737.513.837	1.889.616.460.616
Aset dalam penyelesaian				
	93.827.799.738	14.661.218.035	176.443.940	108.312.573.833
Aset sewa				
pembiayaan	57.533.913.946	-	1.416.720.013	56.117.193.933
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih				
	21.514.084.246	-	-	21.514.084.246
Jumlah	2.079.104.800.901	21.786.189.517	25.330.677.790	2.075.560.312.628
Akumulasi penyusutan				
Pemilikan langsung				
Bangunan	33.876.284.160	7.485.385.523	12.696.818	41.348.972.865
Sarana prasarana	24.313.720.736	1.363.174.064	-	25.676.894.800
Instalasi listrik	13.753.164.156	959.676.530	931.854	14.711.908.832
Mesin dan peralatan	111.823.184.599	3.796.680.542	4.833.836.661	110.786.028.480
Alat-alat berat	118.722.050.222	5.677.929.090	748.829.419	123.651.149.893
Kendaraan	47.153.441.783	1.901.357.795	520.539.217	48.534.260.361
Inventaris Kantor	11.066.741.120	475.500.341	136.781.821	11.405.459.640
Inventaris Camp	1.025.862.918	24.838.834	-	1.050.701.752
Inventaris Pabrik	3.121.573.723	90.721.653	96.728.364	3.115.567.012
Inventaris Toko	1.159.610.308	90.551.853	-	1.250.162.161
Sub-jumlah	366.015.633.725	21.865.816.225	6.350.344.154	381.531.105.796
Aset sewa				
pembiayaan	21.490.189.712	342.082.392	131.192.502	21.701.079.602
Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih				
	11.658.376.414	269.842.764	-	11.928.219.178
Jumlah	399.164.199.851	22.477.741.381	6.481.536.656	415.160.404.576
Nilai Buku	1.679.940.601.050			1.660.399.908.052
	-			1.660.399.908.052

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2017

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai tercatat				
Pemilikan langsung				
Tanah	814.560.000.000	-	-	814.560.000.000
Bangunan	463.040.206.468	3.323.717.243	-	467.592.197.211
Sarana prasarana	60.787.366.911	-	-	70.561.234.844
Instalasi listrik	33.008.503.454	695.369.247	-	33.703.872.701
Mesin dan peralatan	229.678.302.334	25.440.481.300	8.373.480.809	248.909.964.000
Alat-alat berat	151.448.032.402	13.686.000.000	-	165.134.032.402
Kendaraan	67.133.314.439	6.303.541.911	2.023.473.527	82.244.930.536
Inventaris Kantor	14.587.697.271	972.069.907	2.874.000	15.554.493.218
Inventaris Camp	1.138.432.168	141.718.000	-	1.280.150.168
Inventaris Pabrik	4.375.591.138	710.339.215	-	5.084.712.902
Inventaris Toko	1.550.671.489	108.423.000	-	1.603.414.989
Sub-jumlah	1.841.308.118.074	51.381.659.823	10.399.828.336	1.906.229.002.971
Aset dalam				
penyelesaian	31.582.335.724	73.191.925.947	-	93.827.799.738
Aset sewa				
pembiayaan	60.595.461.220	10.273.288.205	-	57.533.913.946
Aset tetap dalam				
rangka bangun, kelola dan alih	20.706.849.128	807.235.118	-	21.514.084.246
Jumlah	1.954.192.764.146	135.654.109.093	10.399.828.336	2.079.104.800.901
Akumulasi				
 penyusutan				
Pemilikan langsung				
Bangunan	1.521.503.413	32.356.172.735	-	33.876.284.160
Sarana prasarana	18.715.319.263	5.598.401.473	-	24.313.720.736
Instalasi listrik	10.206.607.038	3.546.557.118	-	13.753.164.156
Mesin dan peralatan	97.470.495.333	15.433.567.924	1.282.814.511	111.823.184.599
Alat-alat berat	100.535.445.118	18.186.605.104	-	118.722.050.222
Kendaraan	37.558.176.347	7.653.799.929	1.635.577.984	47.153.441.783
Inventaris Kantor	9.135.896.351	1.932.639.811	778.375	11.066.741.120
Inventaris Camp	925.505.034	100.357.884	-	1.025.862.918
Inventaris Pabrik	2.727.547.555	394.051.533	-	3.121.573.723
Inventaris Toko	641.650.328	516.567.992	-	1.159.610.308
Sub-jumlah	279.438.145.780	85.718.721.503	2.919.170.870	366.015.633.725
Aset sewa				
pembiayaan	21.305.409.162	4.090.027.437	-	21.490.189.712
Aset tetap dalam				
rangka bangun, kelola dan alih	10.590.018.832	1.068.357.582	-	11.658.376.414
Jumlah	311.333.573.774	90.877.106.522	2.919.170.870	399.164.199.851
Nilai Buku	1.642.859.190.372			1.679.940.601.050

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYACATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT

Tanggal 31 Maret 2018

Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. ASET TETAP – BERSIH DAN PROPERTI INVESTASI (LANJUTAN)

Nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan dengan menggunakan metode pendekatan pasar dan biaya. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah dan bangunan yang dinilai. Nilai wajar tanah dan bangunan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, tanggal 22 Desember 2016 dalam laporannya tanggal 29 Desember 2016.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2018.

Kelompok Usaha memiliki aset tetap tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 20-30 tahun. Pada tanggal 31 maret 2018, HGB Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 3-29 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HGB tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang saat jatuh tempo.

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

	<u>Perkiraan % Penyelesaian</u>	<u>Nilai Tercatat</u>	<u>Tahun Perkiraan penyelesaian</u>
Bangunan, Sarana dan			
Prasarana	69%	107.579.353.974	April - Oktober 2018
Instalasi Listrik	10%	12.240.000	Maret 2018
Inventaris Toko	70%	720.979.859	Juni 2018
Jumlah		<u>108.312.573.833</u>	

11. ASET TETAP – BERSIH DAN PROPERTI INVESTASI (LANJUTAN)

ITR, Entitas Anak, mengadakan perjanjian pemanfaatan tanah dengan PT Buduran Indah Indonesia (“BDI”), pihak berelasi untuk jangka waktu 20 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. ITR mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Kompensasi atas sewa tanah yang dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun “Beban umum dan administrasi” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

INT, Entitas Anak, memiliki properti investasi berupa tanah dengan HGB dengan jangka waktu 30 tahun. Nilai tercatat properti investasi sebesar Rp 15.880.000.000 pada tanggal 31 Maret 2018.

Jika tanah diukur menggunakan model biaya, nilai tercatatnya akan menjadi sebesar Rp 5.334.000.000 pada tanggal 31 Desember 2015.

Nilai wajar tanah dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar dengan nilai Rp 15.880.000.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai. Nilai wajar tanah didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, tanggal 22 Desember 2016 dalam laporannya tanggal 29 Desember 2016.

Kelompok Usaha mengadakan perjanjian sewa pembiayaan berupa mesin dan kendaraan dengan PT Orix Indonesia Finance, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Equity Finance Indonesia, PT Chandra Sakti Utama Leasing, PT BCA Finance, dan PT Astra Sedaya Finance, IJB Verena dengan jangka waktu 24 sampai 48 bulan.

12. ASET LAIN-LAIN – BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
Biaya pengelolaan hak pengusahaan hutan, bersih	6.287.754.801	6.433.838.096
Aset tetap - pengampunan pajak - bersih	806.093.748	839.999.999
Lain-lain	-	327.241.090
Jumlah	7.093.848.549	7.601.079.185

Kelompok Usaha memiliki hak pengelolaan hutan (“HPH”) dengan jangka waktu 44-54 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2018, HPH Kelompok Usaha masih memiliki sisa jangka waktu 33-36 tahun. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu HPH tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang saat jatuh tempo.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

a. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek terdiri dari:

	31 Maret 2018	31 Desember 2017
	(Tidak diaudit)	(Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
Indonesia Eximbank		
Fasilitas kredit modal		
kerja ekspor I		
(US\$ 5.000.000 dan		
Rp 68.780.000.000		
pada periode 31 Maret 2018;		
dan US\$ 5.000.000 dan		
Rp 93.390.625 pada		
Tahun 2017)	202.230.000.000	161.130.625.000
Fasilitas kredit modal		
kerja ekspor II	120.828.909.724	86.850.000.000
Fasilitas kredit modal		
kerja ekspor III	66.725.000.000	66.725.000.000
PT Bank Negara Indonesia		
(Persero) Tbk		
Revolving loan facility	24.006.658.075	20.599.955.926
The Hongkong and		
Shanghai Banking Corp, Ltd		
Pinjaman atas Export	48.186.930.000	
Sub-jumlah	461.977.497.799	335.305.580.926

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LANJUTAN)

Entitas Anak

Pihak ketiga

Indonesia Eximbank		
Fasilitas kredit modal kerja ekspor II	149.900.000.000	147.300.000.000
Fasilitas kredit modal kerja ekspor IV	73.000.000.000	77.000.000.000
Fasilitas kredit modal Kerja Ekspor Transaksional	60.000.000.000	60.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Revolving loan facility	35.142.682.511	244.981.643.038
Cerukan	93.346.129.390	64.292.598.826
Kredit Modal kerja	184.953.125.000	-
PT Bank ICBC Indonesia		
Pre-export financing Non LC (US\$ 2.459.000 pada Maret 2018 dan US\$ 2.500.000 pada tahun 2017)	33.826.004.000	33.870.000.000
PT Bank Mizuho Indonesia		
Term loan (US\$ 8.000.000)	-	108.384.000.000
Revolving loan (US\$ 2.500.000 pada tahun 2017)	-	27.096.000.000
The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd		
Uncommitted loan	-	27.096.000.000
Sub-jumlah	630.167.940.901	790.020.241.864
Jumlah	1.092.145.438.700	1.125.325.822.790

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LANJUTAN)

b. Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang terdiri dari:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
<u>Perusahaan</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
Indonesia Eximbank		
Fasilitas kredit modal		
kerja ekspor transaksional		54.000.000.000
Fasilitas kredit		
investasi ekspor IV	12.332.243.575	15.415.304.473
Fasilitas kredit		
investasi ekspor V	47.648.630.400	
PT BCA Finance		404.153.518
PT Orix Indonesia Finance		415.588.208
Sub-jumlah	59.980.873.975	70.235.046.199
<u>Entitas Anak</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Fasilitas kredit investasi	70.933.333.326	76.533.333.327
Fasilitas <i>Term Loan</i>	22.361.111.114	25.277.777.780
PT BCA Finance	2.774.079.563	3.095.108.230
PT Orix Indonesia Finance	974.116.680	
PT Chandra Sakti Utama		
Leasing	240.397.112	115.658.173
PT Equity Finance Indonesia	2.377.292.095	205.843.631
PT BFI Finance Indonesia Tbk	3.220.320.680	
PT IBJ Verena Finance	8.871.794.447	
PT Astra Sedaya Finance	43.747.635	53.977.402
PT Dipo Star Finance		
Sub-jumlah	111.796.192.652	105.281.698.543
Jumlah	171.777.066.627	175.516.744.742
Bagian Jatuh Tempo dalam waktu satu tahun	(37.433.121.688)	(91.051.056.058)
Bagian Jangka Panjang	134.343.944.939	84.465.688.684

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. UTANG USAHA

a. Akun ini terdiri dari utang kepada pemasok sebagai berikut:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Impor</u>		
Akzo Nobel Coatings		
Vietnam Ltd	6.711.743.606	10.195.856.139
Yea Chiuan Industrial Co Ltd		2.229.751.232
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2 miliar)	2.810.232.659	3.799.028.735
Sub Jumlah	9.521.976.265	16.224.636.106
 <u>Lokal</u>		
PT Propan Raya ICC	9.335.317.008	12.427.815.149
PT Barito Nusantara Indah		5.973.533.233
PT Gyung Do Indonesia	2.627.438.253	4.166.125.417
PT Kemasan Ciptatama	2.562.618.863	3.391.701.753
PT Grafitecindo Ciptaprima	2.508.946.501	-
PT Premier Jaya Indonesia		2.463.929.593
PT Mega Foamindo Jaya		2.358.895.000
PT Karya Agung Abadi		2.184.710.494
PT Makmur Dinamika Fortuna		2.131.686.596
PT Daya Sakti Usaha Mandiri		2.112.739.002
PT Sari Sarana Kimia Tama	2.335.806.000	2.101.968.000
PT Lautan jati	2.623.877.577	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2 miliar)	61.996.670.143	67.078.118.902
Sub Jumlah	83.990.674.345	106.391.223.139
 Jumlah	93.512.650.610	122.615.859.245

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Tanggal 31 Maret 2018
 Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. UTANG USAHA (Lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
Rupiah	83.990.674.345	106.391.223.139
Dollar Amerika Serikat (US\$ 410.471 Dan US\$ 1.196.736 masing- masing pada Maret 2018 dan Tahun 2017)	9.521.976.265	16.224.636.106
Sub Jumlah	93.512.650.610	122.615.859.245

c. Berdasarkan umur

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
1 - 30 hari	58.005.201.405	76.394.116.719
31 - 60 hari	21.491.350.835	28.736.040.224
61 – 90 hari	8.409.659.022	10.313.301.495
> 90 hari	5.606.439.348	7.172.400.807
Sub Jumlah	93.512.650.610	122.615.859.245

Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

15. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain terdiri dari terdiri dari:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
Synergy Alam Corporation		1.680.353.625
PT Integra Indo Lestari	124.921.017.926	107.321.417.926
Lain-lain		
Masing-masing		
dibawah Rp 1 miliar		
(JPY 7.720.525, US\$ 416		
dan Rp 1.213.979.480		
pada tahun 2017)	12.980.057.881	6.310.247.062
Sub Jumlah	137.901.075.807	115.312.018.613
Jumlah	137.901.075.807	115.312.018.613
Disajikan dalam laporan posisi		
keuangan konsolidasian		
sebagai:		
Liabilitas jangka pendek	14.413.625.493	8.461.000.687
Liabilitas jangka panjang	123.487.450.314	106.851.017.926
Jumlah	137.901.075.807	115.312.018.613

16. PERPAJAKAN

a. Utang pajak terdiri dari:

	31 Maret 2018 Tidak diaudit	31 Desember 2017 Diaudit
Perusahaan		
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	39.554.533	62.982.641
Pasal 15		6.000.000
Pasal 21	227.609.926	360.396.668
Pasal 22	19.645.857	28.868.313
Pasal 23	65.433.826	97.657.861
Pasal 25	1.000.000.000	1.000.000.000
Pasal 26		-
Pasal 29		-
Tahun 2017	29.951.157.642	29.951.157.642
Tahun 2018	1.356.892.267	-
Sub-jumlah	32.660.294.051	31.507.063.125

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

a. Utang pajak terdiri dari: (Lanjutan)

Entitas Anak

Pajak Pertambahan Nilai	548.173.389	4.561.063.602
Pajak penghasilan (PPh):		
Pasal 4 (2)	24.709.161	64.442.621
Pasal 15	14.876.046	300.000
Pasal 21	167.778.477	172.220.586
Pasal 22	86.577.392	106.630.291
Pasal 23	456.375.904	583.536.016
Pasal 25	1.027.139.170	1.259.306.124
Pasal 26		-
Pasal 29		
Tahun 2017	16.305.203.235	16.305.203.235
Tahun 2018	1.908.453.652	
Sub-jumlah	<u>20.539.286.426</u>	<u>23.052.702.475</u>
Jumlah	<u>53.199.580.477</u>	<u>54.559.765.600</u>

b. Pengampunan Pajak

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-1186/PP/WPJ.24/2017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2017, IKM, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 41.200.000 yang dicatat sebagai bagian dari "Kas dan setara kas". Uang tebusan sebesar Rp 1.236.000 telah dibayar IKM pada tanggal 21 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-1369/PP/WPJ.24/2017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2017, ITK, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 12.861.855.000. Uang tebusan sebesar Rp 385.855.650 telah dibayar ITK pada tanggal 28 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-906/PP/WPJ.24/2017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2017, ITR, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 5.328.950.000. Uang tebusan sebesar Rp 159.868.500 telah dibayar ITR pada tanggal 27 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-3738/PP/WPJ.24/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 September 2016, ITD, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 191.251.352. Uang tebusan sebesar Rp 3.825.027 telah dibayar ITD pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Tanggal 31 Maret 2018
 Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Pengampunan Pajak (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-3120/PP/WPJ.24/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 September 2016, INT, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 51.500.000 yang dicatat sebagai bagian dari "Kas dan setara kas". Uang tebusan sebesar Rp 1.030.000 telah dibayar INT pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-2152/PP/WPJ.14/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 September 2016, BRT, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 938.000.000 yang dicatat sebagai bagian dari "Aset lain-lain – pengampunan pajak" di laporan posisi keuangan konsolidasian. Uang tebusan sebesar Rp 18.760.000 telah dibayar BRT pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-2156/PP/WPJ.14/2016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 September 2016, NKT, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 220.000.000 yang dicatat sebagai bagian dari "Aset lain-lain – pengampunan pajak" di laporan posisi keuangan konsolidasian. Uang tebusan sebesar Rp 4.400.000 telah dibayar NKT pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak" dalam "Beban umum dan administrasi".

17. UANG MUKA PELANGGAN

Akun ini terdiri dari uang muka yang diterima dari pelanggan yang berasal dari penjualan *furnitures, building components* dan *log*.

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
<u>Pihak ketiga</u>		
Sumber Mas Indah Plywood	7.272.727.272	11.818.181.818
PT Jati Karya Megah Laksana		11.239.988.384
PT Kayu Alam Perkasa Raya		6.513.327.272
PT Gunung Putra Mandiri	3.250.000.000	4.000.000.000
PT Wijaya Tri Utama Plywood Indonesia	4.145.454.546	2.836.363.636
PT. Kayu Alam Perkasa Raya	9.090.909.091	-
CV. Intraco	2.272.727.273	-
PT. Gema Lestari Indah	5.454.545.454	-
PT Paramitra Multi Prakasa	-	2.286.471.346
Condor Manufacturing Furniture Ltd	-	1.540.565.208
Room To Go	2.386.656.296	-
PT Pakuwon Permai	-	906.260.246
PT Karya Cipta Sukses Anugerah	-	812.804.827
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2 miliar)	6.942.040.768	14.497.143.244
Jumlah	40.815.060.700	56.451.105.981

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Tanggal 31 Maret 2018
 Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. MODAL SAHAM

a. Modal saham

Rincian pemegang saham Perusahaan dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

31 Maret 2018 (Tidak Diaudit)			
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari	4,956,950,000	79,31	495,695,000,000
PT Sinergy Mentari Alam	43,050,000	0,69	4,305,000,000
Masyarakat	1,250,000,000	20,00	125,000,000,000
Jumlah/Total	6,250,000,000	100	625,000,000,000

31 Desember 2017 (Di Audit)			
Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/	Persentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
PT Integra Indo Lestari	4,956,950,000	79,31	495,695,000,000
PT Sinergy Mentari Alam	43,050,000	0,69	4,305,000,000
Masyarakat	1,250,000,000	20,00	125,000,000,000
Jumlah/Total	6,250,000,000	100	625,000,000,000

Berdasarkan akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 13 tanggal 7 September 2016 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0016584.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 15 September 2016, dimana para pemegang saham Perusahaan antara lain menyetujui:

- perubahan status Perusahaan dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka,
- menyetujui perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 100,
- meningkatkan modal dasar dari Rp 500 miliar menjadi Rp 2 triliun.

Berdasarkan akta No. 12 tanggal 25 Agustus 2016, oleh notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp 409,5 miliar menjadi Rp 500 miliar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0015500.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016. Penambahan modal tersebut berasal dari setoran tunai pemegang saham.

Berdasarkan akta No. 13 tanggal 30 Juni 2016 oleh notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp 250 miliar menjadi Rp 409,5 miliar dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 195 miliar menjadi Rp 409,5 miliar. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013757.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016. Penambahan modal tersebut berasal dari dividen saham.

Berdasarkan akta No. 5 tanggal 17 Februari 2017 oleh notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan status Perusahaan dari semula Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0004322.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017.

Berdasarkan akta No. 17 tanggal 7 Maret 2017 oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham Perusahaan menyetujui atas:

- Perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan di bidang pasar modal;
- Perubahan status Perusahaan dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. MODAL SAHAM (LANJUTAN)

a. Modal saham (Lanjutan)

- Menyetujui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portfolio yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum; dan
- Menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka pelaksanaan program manajemen dan karyawan (MESOP).

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005787.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017.

b. Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan akta No. 12 tanggal 30 Juni 2016 oleh notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk pembagian dividen saham sebesar Rp 214,5 miliar.

19. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Tabel berikut ini menjelaskan komponen dari hak pemegang saham non-pengendali entitas anak pada tanggal 31 Maret 2018 sebagai berikut:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
PT WoodOne Integra Indonesia*	-	13.527.712.745
PT Inter Kayu Mandiri	2.667.977.317	2.667.992.317
PT Interkraft	2.144.431.434	2.112.204.459
PT Intertrend Utama	1.577.325.917	1.514.696.015
PT Belayan River Timber	838.742.326	828.875.216
PT Intera Indonesia	1.046.743.509	958.809.541
PT Narkata Rimba	705.115.971	685.073.218
PT Integriya Dekorindo	153.888.662	164.360.637
Jumlah	9.134.225.136	22.459.724.148

*) Melalui PT Inter Kayu Mandiri

20. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Maret 2017 (Diaudit)
Ekspor		
Manufaktur	370.483.574.511	326.352.026.088

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

20. PENJUALAN BERSIH (LANJUTAN)

Lokal		
Kehutanan	32.766.936.777	67.335.437.160
Manufaktur	56.843.196.814	63.659.313.478
Perdagangan	8.437.834.615	8.907.106.172
Jumlah	<u>468.531.542.717</u>	<u>466.253.882.898</u>

21. BEBAN POKOK PENJUALAN

	31 Maret 2018 (Tidak diaudit)	31 Maret 2017 (Tidak diaudit)
<u>Manufaktur dan Kehutanan</u>		
Pemakaian bahan baku	163.340.287.893	159.247.872.421
Upah buruh langsung	52.977.718.824	49.900.899.841
Beban pabrikasi	103.025.280.031	108.257.143.171
Jumlah beban produksi	<u>319.343.286.748</u>	<u>317.405.915.433</u>
Barang dalam proses		
Awal tahun	126.052.122.426	75.557.505.674
Kerugian karena terbakar		
Selisih kurs karena		
penjabaran laporan		
keuangan		
Akhir tahun	<u>(143.351.840.165)</u>	<u>(87.012.959.167)</u>
Jumlah beban pokok produksi	<u>302.043.569.009</u>	<u>305.950.461.940</u>
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	229.596.826.657	197.448.242.058
Pembelian barang jadi	13.958.528.586	32.505.210.497
Kerugian karena terbakar		
Selisih kurs karena		
penjabaran laporan		
keuangan		
Akhir tahun	<u>(227.050.964.318)</u>	<u>(221.022.201.888)</u>
Sub-jumlah	<u>318.547.959.934</u>	<u>314.881.712.607</u>

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Tanggal 31 Maret 2018
 Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

21. BEBAN POKOK PENJUALAN (LANJUTAN)

<u>Perdagangan</u>		
Persediaan awal	22.605.974.230	26.579.011.277
Pembelian	3.888.262.685	4.842.607.944
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		
Persediaan akhir	(20.744.704.349)	(24.909.690.424)
Sub-jumlah	5.749.532.566	6.511.928.797
Jumlah beban pokok penjualan	324.297.492.500	321.393.641.404

Tidak terdapat pembelian dari pemasok individual yang melebihi 10% dari jumlah pembelian bersih untuk periode 31 Maret 2018 dan 2017.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
 Tanggal 31 Maret 2018
 Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

22. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban penjualan dan umum dan administrasi adalah sebagai berikut

	31 Maret 2018	31 Maret 2017
	(Tidak diaudit)	(Tidak diaudit)
<u>Beban penjualan</u>		
Kurir dan ekspor	6.981.919.890	5.572.150.226
Gaji dan tunjangan	5.825.018.471	5.489.847.798
Ongkos angkut	3.601.412.771	1.958.477.175
Penyusutan	1.192.021.692	1.196.700.741
Lain-lain (masing- masing dibawah Rp 2 miliar)	2.527.671.095	2.102.954.817
Jumlah	<u>20.128.043.919</u>	<u>16.320.130.757</u>
<u>Beban umum dan administrasi</u>		
Gaji dan tunjangan	12.799.660.177	11.059.507.157
Jasa manajemen	4.013.579.880	3.684.113.238
Pajak	650.699.689	215.091.597
Penyusutan	1.757.917.374	1.720.043.355
Asuransi	1.313.000.893	1.682.445.185
Jamuan dan sumbangan	667.991.096	493.214.248
Keperluan kantor	1.060.875.881	499.687.034
Sewa	2.366.728.269	829.133.000
Jasa profesional	342.099.036	733.406.068
Perbaikan dan pemeliharaan	359.115.611	687.035.315
Perjalanan dinas	288.490.091	146.967.276
Transportasi	329.731.595	335.281.785
Iuran dan perijinan	75.712.000	381.324.828
Lain-lain (masing- masing dibawah Rp 2 miliar)	1.867.412.301	3.605.638.750
Jumlah	<u>27.893.013.893</u>	<u>26.072.888.836</u>

PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN *INTERIM* TIDAK DIAUDIT
Tanggal 31 Maret 2018
Dan Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

23. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi usaha dan non usaha dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi-transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Sifat hubungan dan transaksi

Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Jenis transaksi
PT Buduran Indah Indonesia (BDI)	Perusahaan Afiliasi	Operasional
PT Integra Indo Lestari (IIL)	<i>Parent of the Company</i>	Operasional

IIL memberikan jasa manajemen di bidang akuntansi, keuangan, pajak, sumber daya manusia dan dukungan jasa teknologi informasi kepada Perusahaan, ITR, ITK, NKT, BRT dan INT. Jumlah beban jasa manajemen dari transaksi tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Beban umum dan administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

24. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2018 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
Laba tahun berjalan	57.158.622.430	173.526.689.500
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	6,250,000,000	5,625,000,000
Laba per saham dasar dan dilusian	36,58	30,85

25. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	31 Maret 2018 (Tidak Diaudit)		31 Desember 2017 (Diaudit)	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah
ASET				
Kas dan setara kas	US\$ 784,066	10,785,607,687	US\$ 925,086	12,533,068,246
	RMB 2,544	5,549,663	RMB 21,314	44,193,401
Piutang usaha	US\$ 9,844,853	135,425,797,868	AUD 333	3,511,459
			US\$ 7,091,829	96,080,100,880
Jumlah		146,216,955,218		108,660,873,986
LIABILITAS				
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	US\$ 7,459,000	102,606,004,000	US\$ 19,500,000	264,186,000,000
	US\$ 410,471	5,646,439,076	US\$ 1,196,736	16,224,636,106
Utang usaha			JPY 7,720,525	926,463,000
			US\$ 416	5,635,968
Utang Lain-lain				
Jumlah		108,252,443,076		281,342,735,074
Aset - bersih		37,964,512,142		(172,681,861,088)

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada periode 31 Maret 2018 dan Tahun 2017.